

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL  
(STUDI DI KOTA MANADO TAHUN 2005-2015)**

*EFFECT OF GENERAL ALOCATION FUND, LOCAL TAXES, AND LEVIES  
AGAINST CAPITAL EXPENDITURE  
(STUDY CITY OF MANADO 2005-2015)*

**A H<sup>1</sup>, S<sup>1</sup>, W P<sup>2</sup>, J<sup>3</sup>, I S<sup>3</sup>**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115Indonesia  
Email : [anggunhassan03@gmail.com](mailto:anggunhassan03@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Manado selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2015. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Secara simultan Dana Alokasi Umum, Pajak, Daerah Dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : Belanja Modal, DAU, Pajak, Retribusi.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the General Allocation Fund, Local Taxes and Levies Against Capital Spending on local government district / city of Manado for the period 2005 to 2015. The analytical tool used in this research is multiple linear regression analysis. Research shows that partially the General Allocation Fund significantly influence Capital Expenditure but Local Taxes, Levies has no effect and no significant on Capital Expenditure, General Allocation Fund Simultaneously, Taxes, Regional And Local Retribution significant effect on Capital Expenditure.*

Keywords: Capital expenditures, general allocation fund, Taxes, levies.

## 1. PENDAHULUAN

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan nilai Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Dana Alokasi umum melalui belanja modal. Penganggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat Keefer dan Khemani dalam (Gugus Wandira 2013).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dan masing-masing program dengan sumber daya yang terbatas Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif Yovita (dalam Gugus Wandira, 2013). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik Darwanto dan Yustikasari (dalam Gugus Wandira, 2013).

Dalam Pengelolaan keuangan, Pemerintah daerah harus dapat menetapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber dari penerimaan Daerah yang berasal dari Daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah Kawedar (dalam Priwakasari, 2014).

Belanja Modal di Pemerintah Kota Manado dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 anggaran belanja modal Kota Manado periode Tahun 2005-2015.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Belanja Modal Kota Manado 2005-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal</b>
2005	121.920.404.637
2006	82.567.214.000
2007	99.564.056.337
2008	146.608.767.942
2009	146.370.781.971
2010	97.490.453.342
2011	185.671.902.100
2012	193.005.726.618
2013	201.846.578.630
2014	238.478.555.850
2015	21.930.729.600

*Sumber : BPS Kota Manado*

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat perubahan yang terjadi pada alokasi belanja modal terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2006 sempat terjadi penurunan angka yang signifikan dari 121.921.404.637 menjadi 82.567.214.000 dan pada tahun 2010 dari angka tahun sebelumnya sebesar 146.370.781.971 menjadi 97.490.453.342 namun secara keseluruhan perubahan yang terjadi pada alokasi belanja modal terus mengalami pertumbuhan.

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk membagi tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah bersangkutan, agar jalannya pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang lebih terfokus karena pemerintah di daerah tentu lebih mengetahui permasalahan serta kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Selain itu kemampuan sebuah daerah untuk mengelola serta memanfaatkan anggaran rumah tangganya sendiri hingga bisa mencapai tahap yang maksimal dan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat di daerah.

Hal ini tentu menarik untuk diteliti untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen Belanja Modal.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap lokasi Belanja Modal
2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap alokasi Belanja Modal
3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap alokasi Belanja Modal

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Data dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi tertentu yang sesuai dengan jenis penelitian dan dalam penelitian ini

mengambil dari data dari Badan Perencanaan Kota Manado (BAPPEDA) dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis tabel, dan analisis regresi linier berganda.

Menurut Agus Widarjon 2007 (dalam Yoan 2015) model umum analisis regresi berganda dapat digambarkan seperti berikut ini : 1).  $Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \dots + \beta_n X_{nt} + e_t$ . Dimana : Y = Variabel dependen, t,I = data time series, data cross section = observasi ke I,  $\alpha$  = intersep atau nilai Y saat X = 0,  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$  = Variabel independen,  $\beta_1, \beta_2, \beta_n$  = Parameter dari  $X_1, X_2, X_n$ ,  $e_t$  = Error term atau derajat kesalahan. Pada penelitian ini, model yang digunakan mempunyai bentuk : 2).  $Y = f(X_1, X_2, X_3)$ . Dari fungsi tersebut diatas kemudian dispesifikasikan kedalam model logaritma dengan spesifikasi modelnya sebagai berikut : 3).  $LY = \alpha + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \beta_3 LX_3 + e_i$ .

Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sementara variabel dependennya adalah belanja modal, yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam pembentukan modal yang sifatnya menambah asset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik yang ada di Kota Manado selama periode 2005-2015. Di pilihnya Badan Pusat Statistik karena dalam hal ini pelaporan sangat terbuka dan mengeluarkan pelaporan tentang data variabel dependent dan variabel independent pada tahun 2005-2015. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak daerah, Retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah di Kota Manado dengan menggunakan Analisis tabel dan regresi linier berganda pada tahun anggaran 2005-2015.

Keseluruhan model dalam studi ini diestimasi dengan menggunakan paket program eviews dengan spesifikasi model sebagai berikut:

**1. Analisa regresi berganda dengan Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Umum sebagai variabel independen dan alokasi Belanja Modal**

Eviews 0.8	LY	LX1	LX2	LX3
C	5.734622	0.995356	0.244334	0.379542
SE	1.726066	0.214784	0.066261	0.291424
T-STATISTIC	3.322366	4.634223	3.687450	1.302369
R2	0.908077	-	-	-
F-STATISTIK	19.75741	-	-	-

**2. Hasil Uji t terhadap parameter Tingkat Pajak Daerah (X1)**

$N = 10 =$  Jumlah observasi,  $K = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 10 - 4 = 6$  lalu lihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (6 ; 0,025) = 2,447$  T tabel = 2,447 dan t hitung = 4.634. Karena t hitung > t tabel, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Berarti secara individu variabel independen Pajak Daerah (x1) mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal (Y). jadi dapat di simpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap alokasi belanja modal di Kota Manado pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien x1 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap alokasi belanja modal. nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar 4,634 artinya hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh x1 terhadap Y signifikan pada ( $\alpha = 0,005$ ).

**3. Uji t terhadap parameter tingkat Retribusi Daerah (X2)**

$N = 10 =$  Jumlah observasi,  $K = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 10 - 4 = 6$  lalu lihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (6 ; 0,025) = 2,447$ . T tabel = 2,447 dan t hitung = 3.687. Karena t hitung > t tabel, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima. Berarti secara individu variabel independen Retribusi Daerah (x2) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap jumlah alokasi Belanja Modal (Y). jadi dapat di simpulkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah Belanja Modal di Kota Manado pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien x2 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang Positif terhadap alokasi belanja modal. nilai koefisien  $\beta_2$  sebesar 3,687 artinya hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh x2 terhadap Y signifikan pada ( $\alpha = 0,005$ ).

**4. Uji t terhadap parameter Dana Alokasi Umum (X3)**

$N = 10 =$  Jumlah observasi,  $K = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 10 - 4 = 6$  lalu lihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (6 ; 0,025) = 2,447$ . T tabel = 2,447 dan t hitung = 1.302 Karena t hitung < t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berarti secara individu variabel independen Dana Alokasi Umum (x3) memberikan pengaruh secara signifikan kecil terhadap jumlah alokasi Belanja Modal (Y). jadi dapat di simpulkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang negative//kecil terhadap jumlah Belanja Modal di Kota Manado pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien x3 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa Alokasi Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang Positif terhadap alokasi belanja modal. nilai koefisien  $\beta_3$  sebesar 1.302 artinya hasil uji t menunjukkan bahwa tidak pengaruh x3 terhadap Y signifikan pada ( $\alpha = 0,005$ ).

## 5. Hasil Uji F-test statistic

Hipotesis :  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3$ , artinya secara bersama-sama variabel  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  tidak berpengaruh Alokasi Belanja Modal (Y).  $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3$  artinya secara bersama-sama variabel  $X_1, X_2$  dan  $X_3$ , berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal (Y).  $\alpha = 5\%$ ,  $N =$  jumlah observasi,  $K = 4$  Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 10 - 4 = 6$  lalu lihat F tabel distribusi values =  $(\alpha = 0,05 : k-1, n-k) = .$  F tabel = 4,53 F hitung = 19.757. Karena F hitung > F tabel, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi jumlah alokasi Belanja Modal Kota Manado (Y).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa kontribusi maupun pengaruh dari sektor pendapatan asli daerah yakni pendapatan pajak, dan pendapatan retribusi mampu memberikan efek yang besar dan signifikan terhadap alokasi belanja modal dari Pemerintah Kota Manado.
2. Sedangkan untuk pengaruh belanja modal hanya mampu memberikan pengaruh yang kecil dan masih belum mampu memberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal yang ada di Kota Manado. Dengan terjadinya hal tersebut membuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi masih belum maksimal terhadap pembangunan sektor ekonomi.
3. Sementara untuk hasil uji secara simultan variabel Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja modal yang ada di Kota Manado.

### SARAN

1. Diharapkan Pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan kemandiriannya sehingga dapat lebih menggenjot perekonomian serta pembangunan yang ada di Kota Manado.
2. Membuka atau meningkatkan kemampuan serta potensi sumber-sumber ekonomi potensial sehingga nantinya dapat menunjang keuangan daerah sehingga pemerintah dapat merangsang siklus ekonomi yang ada yang nantinya dapat berujung pada peningkatan perekonomian daerah serta meningkatnya perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Widarjono 2013 : *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya : Regresi Berganda*, edisi keempat, penerbit : UPP STIM YKPN

Afriana Purnama Sari 2016, : “ *Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu*” Skripsi

Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Asrinanda 2014 :“ Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan belanja modal terhadap pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah “ Jurnal Akutansi Volume (2) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Bagus Bowo Laksono 2014 : “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah” Jurnal Akutansi volume (6) Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi AJJ 3 Universitas Negeri Semarang Indonesia

Barri Litt PhD CPA 2013 : “*Why Do Firms Invest in Capital Expenditures? Evidence from Environmental Activities*” *Journa volume (3) International Journal of Business and Social Science, Huizenga School of Business and Entrepreneurship Nova Southeastern University*

Darwanto dan Yulia Yustikasari 2007 : “ Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal” Jurnal Akutansi volume (4) Simposium Nasional Akutansi X Makassar

Ebiringa, O.T 2012 : “ *Analysis of Tax Formation and Impact on Economic Growth in Nigeria*” *journal Management Technology Federal volume (2) University of Technology, Owerri, Nigeria*

Fakhrudin Yusuf 2014, : “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Keresidenan Surakarta” Skripsi Fakultas

Handayani, Dwi dan Elva Nuraini 2012 : “ Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun” Jurnal Akutansi dan Pendidikan Volume (1) 2 Madiun. IKIP PGRI Madiun

Ihham Tajuddin, Basri Hassanudin, Rahmatia Paulus Uppun 2014 : “*The Effects Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Revenue-Sharing Funds On Investment, Economic Growth, Economic Structure, And Employment*” *Journal of Research in Business and Management Volume 2 ~ Issue 10 (2014) Quest, Universitas Hassanudin Makassar*

Khubbi Abdillah1, Djoko Mursinto2 : “ *The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province*” *Journal vol (6) <sup>1</sup>Doctoral Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, <sup>2</sup>Economics Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia*

Luh Putu Rani Masyarani 2014 : “ Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian belanja modal Kabupaten Buleleng” Jurnal Manajemen volume (3) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gaja Madah Yogyakarta

Puspitasari Novia Ayu 2014,“ Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Dividen” Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis” Universitas Diponegoro Semarang

Sulistyowati Diah 2011, : “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, terhadap Alokasi Belanja Modal” (jurnal) volume (2) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Srina Br ginting 2012 : “ Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah Kabupaten Kota Sumatera Utara” Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Walidun Husain 2013 : “*The influence of local taxes and levies towards expenditure allocation in Kota Gorontalo Indonesia* “ *Economic journal volume (5) Economics and Business Faculty of State University of Gorontalo*

Yoan Purnamasari Bahalau 2015 : “ Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 1993-2013” Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

Lain-lain :

Badan Pusat Statistik Kota Manado Tahun 2004-2015

Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Republik Indonesia, PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 (pasal 53 ayat 2) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Belanja Modal

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, PSAP No. 7 Tentang Akutansi Aset Tetap